

Pj Gubernur Jabar Pastikan Harga Beras di Pasar Murah di Bawah HET

MAJALENGKA (IM)- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi Machmudin memastikan beras, yang disediakan dalam program pasar murah selalu dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET), sehingga meringankan masyarakat untuk membelinya.

“Contohnya, di Majalengka, ada pasar murah, yang menjual beras Rp10.400 per kg, sedangkan HET itu Rp10.800 per kg. Ini khusus di pasar murah,” kata Bey saat melakukan kunjungan kerja di Majalengka, Jabar, Jumat (23/2).

Ia mengatakan sejumlah kabupaten/kota di Jabar sudah melaksanakan program ini, maupun kegiatan serupa seperti gerakan pangan murah (GPM) yang menjual beras dengan harga terjangkau. Melalui program-program itu, kata Bey, pemerintah berupaya menjaga harga beras tetap stabil dan meningkatkan suplai komoditas ini agar terdistribusi secara masif kepada masyarakat.

“Ini tentunya sangat membantu masyarakat. Tidak hanya beras, cabai, daging, telur dan gula harganya sangat baik dan ini membantu menekan inflasi,” ujarnya.

Bey pun mengajak warga, khususnya di Majalengka untuk membeli beras murah sesuai kebutuhan supaya penyalurannya bisa merata.

Di sisi lain, lanjutnya, warga pun tidak perlu khawatir karena stok beras untuk wilayah Majalengka yang ada di gudang Bulog setempat masih tersedia 3.000 ton serta dipastikan mencukupi

kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. “Memang untuk beras tidak perlu panik dan jangan beli berlebihan karena di stok Bulog banyak. Beli secukupnya. Ini juga nanti akan masuk ke ritel, walaupun ada proses administrasi di ritelnya,” ujarnya.

Bey menambahkan kenaikan harga beras beberapa waktu lalu disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya karena dampak dari adanya fenomena El Nino.

Ia menekankan pemerintah terus berusaha menjaga suplai di pasaran tetap ada, agar harga beras kembali stabil sesuai daya beli masyarakat.

“Sekali lagi stok di Bulog itu aman baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Paling penting kita upayakan agar masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga sewajarnya,” ucap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka mengencangkan program pasar murah yang menjual beras medium jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan harga Rp10.400 per kg atau Rp52.000 dalam ukuran lima kg. Dalam program tersebut, Pemkab Majalengka menggandeng Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon untuk menyediakan 10 ton beras SPHP dalam setiap kegiatan pasar murah.

● pra

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

RUMAH MAGGOT UNTUK KURANGI SAMPAH ORGANIK

Petugas mengolah sampah organik di Rumah Maggot di Kelurahan Kujangsari, Bandung, Jabar, Jumat (23/2). Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional Pemkot Bandung menggalakan program Rumah Maggot yang diharapkan mampu mengurangi sebanyak 151 ton sampah organik per hari.

Proyek Jalan Tol Terpanjang RI Dilanjut, Pembebasan Tanah Sudah Sampai Garut

Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) merupakan proyek tol terpanjang, karena melintasi provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dan memiliki panjang mencapai 206,65 km.

JAKARTA (IM)- Proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang sempat mandek, kembali dilanjutkan pemerintah. Getaci sendiri merupakan proyek jalan tol terpanjang yang ada di Indonesia saat ini.

Melansir dari pemberitaan Antara, Jumat (23/2), sejauh ini progres pengerjaan jalan tol ini masih dalam tahap pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Di mana dalam hal ini, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengungkapkan pihaknya sudah berhasil melakukan pembebasan lahan proyek dari Gedebage hingga Garut. “Berprogres. Saya mendapat kabar, posisi terakhir pekan lalu, proses pembebasan tanah untuk tol telah sampai Garut,” kata Bambang.

Bambang berharap seiring dengan progres

tersebut, proses konstruksi Tol Getaci sudah bisa dilakukan dari Gedebage ke Garut, setidaknya pada 2024 ini. Walaupun pada akhirnya ia berpendapat jika masalah konstruksi jalan tol ini merupakan wewenang pemerintah pusat. “Mudah-mudahan target pemerintah di 2024, sampai dengan Garut konstruksi sudah bisa dikerjakan,” ungkap Bambang.

“Ini memang domain pemerintah pusat. Yang bisa kami lakukan, mendorong agar segera dilaksanakan. Tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan itu,” tambahnya lagi.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya

masih dalam tahap lelang proyek. Adapun penentuan pemenang lelang proyek Tol Getaci ditargetkan tahun ini.

Meski begitu, saat itu Basuki sendiri belum bisa memastikan kapan tepatnya pemenang lelang ini ditentukan dan mulai mengerjakan konstruksi. Namun ia memastikan pihaknya terus berkoordinasi terkait pembangunan proyek jalan tol terpanjang di RI ini.

“(Penetapan pemenang lelang proyek ditargetkan) ya tahun ini,” kata Basuki saat ditemui wartawan usai pencoblosan di TPS 161 Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Rabu (14/2) lalu.

“Saya kemarin kebetulan rapim (rapat pimpinan), saya tanya satu per satu (jajarnya) terkait proyek Tol Getaci kita lagi kayak market sounding kira-kira ada yang

mau ikut tender atau nggak,” tambahnya lagi.

Getaci sendiri merupakan proyek tol terpanjang, karena melintasi provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ini memiliki panjang 206,65 km. Di wilayah Jawa Barat, Tol Getaci diperkirakan akan membentang sepanjang 171,40 km. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah tol ini akan melintasi sepanjang 35,25 km.

Rencananya jalan tol ini terbagi atas empat seksi, yakni: - Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 kilometer. - Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer. - Seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 kilometer. - Seksi 4 Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 kilometer.

● pra



IDN/ANTARA

HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL 2024 DI TANGERANG

Warga menyetorkan sampah bernilai jual miliknya ke Bank Sampah Perempuan Mikro Teluk Naga saat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 di Desa Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kab. Tangerang, Banten, Jumat (23/2). Acara diselenggarakan PT Amarta dan Unilever Indonesia bekerja sama dengan Bank Sampah Perempuan Mikro Teluk Naga.

HASILKAN 1,4 TON PER HARI

Gedung Sate Bandung Kelola Sendiri Sampah di Lingkungan

BANDUNG (IM)- Penanganan sampah di lingkungan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat, saat ini sudah dikelola secara mandiri melalui beberapa skema pemrosesan. Menurut Penjabat Sekda Provinsi Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso, sampah yang dikelola di Gedung Sate antara lain berasal dari area kantor gubernur itu sendiri, Lapangan Gasibu, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), dan area GOR Saparua.

Total per hari sampah yang dihasilkan sekitar 1,4 ton. Sampah tersebut bervariasi terdiri dari sampah organik, anorganik, dan limbah B3 dari poliklinik milik Pemprov Jabar di area gedung pemerintahan itu.

“Sampah di Gedung Sate yang terbesar atau 88 persen berasal dari sampah halaman karena saking luasnya halaman gedung tersebut, kemudian Gasibu, Monju, sampai kawasan Saparua. Itu semuanya dikelola di Gedung Sate,” ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan, di Gedung Sate sudah bisa melakukan pengolahan jenis-jenis sampah. Langkah-langkah yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Pemprov Jabar, di antaranya menyediakan tiga warna tempat sampah ses-

uai dengan kategorinya, kemudian sampah dipilah di ruangan khusus, ditimbang, dan masing-masing jenis lalu dikirim ke tempat pengolahan.

Selain itu, kata Taufiq, di area belakang Gedung Sate sudah memiliki rumah magot untuk sampah organik, area pembuatan ecobrick, komposting, biomassa, mesin pembuat pelet pakan, dan lain-lain. Baru sisa sampah yang tidak dapat diolah dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Itu semua harus diolah dan kita jadikan produk yang bermanfaat. Hasil akhirnya memang diharapkan bisa diolah kembali dan nanti residu yang kita kirim ke TPA,” katanya.

Beberapa hasil pengolahan pun ditampilkan di hadapan forum, salah satunya dari pemanfaatan ecobrick yang diubah menjadi furnitur, kursi, dan meja. Taufiq berharap cara-cara pengolahan sampah oleh Pemprov Jabar juga bisa diterapkan di Kota Bandung.

“Kita juga akan kerja sama dengan Kelurahan Citarum di Kota Bandung maupun LSM yang ada di sana untuk saling membantu (dalam pengelolaan sampah),” kata Taufiq. ● pra

Komisi II: Sektor Perkebunan Bisa Atasi Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

BANDUNG (IM)- Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan sektor perkebunan di Jawa Barat khususnya bisa mengatasi angka kemiskinan di Jawa Barat. Salah satu syaratnya yakni produk Jawa Barat bisa menguasai pasar sehingga tidak ada substitusi dari produk luar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, pada acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan tema “Menuju Perkebunan Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah”, di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Kamis, (22/2).

Menurut Yunandar, DPRD bersama stakeholder terkait harus bisa mengawasi pengendalian produksi sektor perkebunan sehingga kedepannya bisa mengendalikan harga dalam jangka panjang. Sektor perkebunan juga harus memberikan jaminan harga jual yang baik, barang baku yang terbaik pula, bahkan juga jaminan jumlah yang selalu stabil. Sehingga bisa menyerap lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Jadi kita harus menjamin kepada supplier baik kepada demand di pasar bahwa kita

mempunyai produk yang memberikan jaminan komoditi yang baik. Bahkan, jaminan volume komoditas yang selalu stabil. Sehingga bisa menyerap penanam modal/investor yang baru,” kata Yunandar.

Diharapkan, kata Yunandar, lebih jauhnya bisa meningkatkan produksi dan peningkatan kesejahteraan petaninya. Ketika petani meningkat kesejahteraannya akan membutuhkan pelaku usaha yang lain. Sudah tentu pergerakan perekonomiannya akan tumbuh.

Selain itu, Yunandar mencontohkan perkebunan di Jawa Barat diawali oleh kolonial Belanda yakni dengan menciptakan perkebunan yang berkembang dengan pesat dan bisa memancing tumbuhnya bisnis-bisnis lain. Karena itulah sektor perkebunan berkembang pesat makan kemiskinan bisa terselesaikan.

Seperti zaman dahulu ketika Perkebunan di Jawa Barat dibuka oleh orang-orang Belanda. Mereka tidak sendirian awalnya, sampai perkebunannya berkembang dan menciptakan bisnis-bisnis lainnya, sampai akhirnya Bandung pun dijuluki Paris Van Java, karena munculnya dari konsep perkebunan ini ketika perkebunan mensuplai kebutuhan di Bandung Raya.

Hasilnya, kemiskinan ekstrem bisa diselesaikan dengan

bagaimana kita memajukan perkebunan sehingga perkebunan Jawa barat bisa naik kelas, yang tadinya di jual di Jawa Barat, bisa dijual secara nasional bahkan mancanegara, tambahnya.

Apalagi, lanjut Yunandar, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki salah satu varietas kopi terbaik di dunia. Sebab, dengan adanya perkebunan kopi di Jawa Barat seharusnya bisa mengatasi masalah kemiskinan.

Pelaku usaha kopi salah satu penggerak perekonomian dari hulu ke hilir. Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan harus selalu bisa membuat desain dan development untuk sektor kopi di Jawa Barat.

Mereka itu, tidak hanya petani saja, tidak hanya cafe saja tapi ada juga yang mengolah menjadi bahan olahan lainnya, dan ini butuh dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jadi kita harus bisa mengedukasi, membuat desain dan development, dan yang penting juga bagaimana mereka mau menjadi bagian dari bisnis ini, jadi bukan hanya ingin menjadi pegawai pemerintah saja tapi harus berani masuk didalam bisnis perkebunan ini, kata Yunandar mengakhiri. ● lys



Sekretaris Komisi II Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, pada acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, di Hotel Grand Sunshine, Kabupaten Bandung. Kamis, (22/2).



157

TURUNKAN HARGA BERAS

Bulog Dramaga Pasok Beras ke Pedagang Pasar Tradisional

BOGOR (IM)- Untuk menekan inflasi atau kenaikan harga, Gudang Bulog Dramaga dibantu mitra kerja memasok beras SPHP kepada para pedagang di pasar rakyat atau tradisional.

Laju inflasi harga beras dimulai sejak awal Tahun, dan harga beras yang awalnya Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu per liter, kini menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 17 ribu per liter.

“Selain menyalurkan bantuan beras gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bulog juga memasok beras SPHP kepada para pedagang,” ungkap Kepala Cabang atau

Gudang Bulog Dramaga, Yanto Nurdianto kepada wartawan, Jumat (23/2).

Yanto Nurdianto menerangkan bahwa harga jual pedagang kepada pembeli harus sesuai ketetapan yaitu Rp 11 ribu per liter, hal ini karena petani kita sedang belum panen beras yang diakibatkan memburuknya cuaca atau terdampak El-Nino.

“Bulog Dramaga sudah memasok 1300 ton beras SPHP ke pedagang pasar, hingga kami harapkan harga beras menurun dan pasokan beras buat Bulan Puasa atau Ramadhan aman,” terang Yanto Nurdianto. ● gio

Bandung Siap Jadi Kota Layak Anak 2024

BANDUNG (IM)- Pejabat Ketua TP PKK Kota Bandung, Linda Nurani Hapsah menyebut, Kota Bandung siap menyambut acara kabupaten/kota layak anak 2024. Ia optimistis, Kota Bandung dapat meraih predikat kota layak anak pada tahun ini.

Pihaknya juga mengomentari sejumlah prestasi yang didapatkan oleh sejumlah instansi yang berada di Kota Bandung, Antara lain SLBN Cicendo, Taman Tongkeng, Perpustakaan Daerah Kota Bandung, SLBN Cicendo, UPTD Puskesmas Garuda, Telkom Daycare Kota Bandung, Puspaga Kota Bandung, Perpustakaan Daerah Kota Bandung, dan RSUD Bandung Kiwari. “Kita mendapat banyak penghargaan, dan kami meyakini ini kolaborasi tim yang luar biasa,” kata Linda Nurani Hapsah, Jumat (23/2).

Berkaca pada fakta tersebut, ia berharap Kota Bandung dapat terus bertumbuh menjadi tempat yang nyaman bagi perkembangan anak. Apabila

hak-hak dan perlindungan anak dipenuhi, maka Kota Bandung akan menyumbang orang-orang hebat yang nantinya akan menjadi pemimpin di era Indonesia Emas 2045. “Semoga anak-anak Kota Bandung mendapat haknya menciptakan generasi terbaik di era Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumirah turut optimistis Kota Bandung dapat mengakselerasi hasil evaluasi kota layak anak 2024.

Ia juga berharap, kualitas serta prestasi yang sudah diraih sejumlah instansi di Kota Bandung menjadikan Kota Bandung salah satu barometer kota layak anak di Jawa Barat. Saat ini dituturkan ia, Pemkot Bandung telah melakukan rapat koordinasi persiapan dan sedang melakukan bimbingan teknis terkait persiapan menuju Kota Layak Anak. ● pra